



LAPORAN ASESMEN

Analisa Situasi Pendidikan Anak Usia Dini di Sumba Barat Daya

Sylvinus Jowi Pedor, M. Si
William & Lily Foundation
May 2019



William & Lily
FOUNDATION

LAPORAN ASESMEN

Analisa Situasi Pendidikan Anak Usia Dini di Sumba Barat Daya

Sylvinus Jowi Pedor, M. Si
William & Lily Foundation
May 2019

ABBREVIATIONS

Abbreviations	English	Indonesian
APE	<i>Educationa Games Tool</i>	Alat Permainan Edukatif
BAPPELITBANGDA	<i>Regional body for planning, research and development</i>	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
BKB	<i>Parenting group formed by</i>	
BOP	<i>School Operating Assistance Fund</i>	Bantuan Operasional PAUD Pendidikan Anak Usia Dini
DP2KB	<i>Regional office of population and family planning control</i>	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
DP3A		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DPMD	<i>Regional office of village and community empowerment</i>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
ECCD	<i>Early Childhood Care and Development</i>	Pengembangan Anak Usia Dini
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>	Diskusi Grup Terfokus
KII	<i>Key Informant Interview</i>	Wawancara Informan Kunci
NTT	<i>East Nusa Tenggara</i>	Nusa Tenggara Timur
PAUD	<i>Early Childhood Education</i>	Pendidikan Anak Usia Dini
PAUD HI	<i>Early Childhood Education Holistic Integratif</i>	Pendidikan Anak Usia Dini terintegrasi secara holistik (<i>Holistic Integratif</i>)
KEMENDIKBUD	<i>Ministry of Education and Culture</i>	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
LSM	<i>Non Profit Organization</i>	Lembaga Swadaya Masyarakat
RISKESDAS	<i>National Basic Health Survey</i>	Riset Kesehatan Dasar Nasional
SUSENAS	<i>National Household Survey</i>	Survei Sosial Ekonomi Nasional
SMA/SMU/SLTA	<i>High School</i>	Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Umum Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
WLF	<i>William and Lily Foundation</i>	Yayasan William dan Lily

DAFTAR ISI

ABBREVIATIONS	iii
Daftar Gambar.....	v
Daftar Tabel.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
1. Latar Belakang.....	1
1.1. Pendahuluan	1
1.2. Tujuan Penelitian.....	1
1.3. Demografis Wilayah.....	2
2. Metodologi.....	4
2.1. Metode Pengumpulan Data.....	4
2.2. Teknik Sampling dan Analisa Data	5
3. Hasil Kajian	7
3.1. Indikator Kunci Pendidikan Anak Usia Dini.....	7
3.2. Akses dan Ketersediaan Layanan PAUD	9
3.3. Kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.....	11
3.4. Kesenjangan Kapasitas PAUD	12
3.5. Kebijakan terkait PAUD.....	14
4. Kesimpulan	16
Daftar Pustaka	18
Lampiran.....	19
Daftar Lembaga Swadaya Masyarakat Sumba Barat Daya.....	19
Rujukan Peraturan Pemerintah tentang PAUD	20

Daftar Gambar

Grafik 1: Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Sumba Barat Daya (BPS, 2018).....	2
---	---

Daftar Tabel

Table 1: Jumlah PAUD/TK/RA dan Kelompok Belajar per Kecamatan (Dapodik Kemedikbud 2018)	3
Table 2: Target Responden FGD	4
Table 3: Tipe dan Jumlah Responden Wawancara Bersama Informan Kunci	5
Table 4: Target Responden IDI	5

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pendidikan anak usia dini sangat penting untuk memastikan anak-anak berprestasi secara optimal dalam setiap aspek kehidupan mereka. Sembilan puluh persen perkembangan otak anak terjadi dalam lima tahun pertama kehidupan mereka. Terlepas dari pentingnya pendidikan anak usia dini terhadap proses perkembangan anak-anak, tingkat pendaftaran peserta didik dalam program pra-sekolah di Indonesia masih relatif lebih rendah daripada di negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand. Menjawab berbagai macam persoalan dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), WLF (*William and Lily Foundation*) berkomitmen untuk meningkatkan akses ke pendidikan berkualitas, khususnya pendidikan anak usia dini. WLF percaya bahwa pendidikan anak usia dini sangat penting dalam memungkinkan kaum muda di komunitas terpinggirkan untuk tumbuh menjadi individu yang mandiri.

Kajian analisa situasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang dilaksanakan sejak Desember 2018 hingga Februari 2019, ini menggunakan pendekatan kualitatif yang meliputi wawancara dan diskusi bersama dengan para orang tua, tenaga pendidik, pengelola PAUD, pemangku kepentingan di tingkat kabupaten, serta anggota masyarakat di Sumba Barat Daya. Selain pengumpulan data primer tersebut, kajian ini juga menggunakan beberapa data sekunder dari pemerintah tingkat kabupaten, provinsi, dan bahkan nasional. Sebagai bagian dari triangulasi data, kajian ini juga mengadakan lokakarya rapat konsultasi akhir proses analisis data, yang melibatkan pemangku kepentingan dari tingkat pemerintah dan tingkat masyarakat. Lokakarya ini sendiri bertujuan sebagai bentuk validasi hasil analisa situasi, serta mendorong partisipasi pemangku kebijakan untuk menindaklanjuti masalah PAUD di daerah ini.

Dalam prosesnya, kajian ini menemukan beberapa isu-isu penting seperti tingkat kehadiran anak di PAUD, keaktifan pembelajaran di PAUD, ketersediaan APE (Alat Permainan Edukatif), pengetahuan tenaga pendidik terkait PAUD, pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik dan pengelola PAUD, pendampingan, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan oleh pengawas PAUD, ketersediaan gedung dan fasilitas PAUD yang layak dan ramah anak untuk proses pembelajaran serta belum adanya peraturan di tingkat kabupaten yang mengatur terkait pendidikan khususnya PAUD.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, beberapa rekomendasi strategi utama yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan pengetahuan tenaga pendidik dan pengelola tentang PAUD.
2. Meningkatkan kualitas layanan Pendidikan di PAUD melalui dukungan penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE), sarana sanitasi serta ruang kelas yang layak dan ramah anak.
3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi serta bekerjasama dengan pengawas tingkat kabupaten.
4. Meningkatkan pengetahuan dan dukungan orang tua murid dan masyarakat sekitar akan pentingnya keberadaan PAUD yang berkualitas melalui komite PAUD atau kelompok peduli pendidikan di wilayah setempat.

5. Menggiatkan kembali kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang menasar peningkatan pengetahuan orang tua akan praktik pengasuhan.
6. Meningkatkan koordinasi lintas sektor yang melibatkan dinas terkait, perangkat desa serta Lembaga swadaya masyarakat lainnya terkait PAUD.
7. Menginisiasi penyusunan peraturan di level kabupaten terkait Pendidikan termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan bekerjasama dengan sektor-sektor terkait.

Kata Kunci: *Kajian Pemetaan Kebutuhan, Pendidikan Anak Usia Dini, Sumba Barat Daya*

1. Latar Belakang

1.1. Pendahuluan

Pendidikan anak usia dini sangat penting untuk memastikan anak-anak berprestasi secara optimal dalam setiap aspek kehidupan mereka. Sembilan puluh persen perkembangan otak anak terjadi dalam lima tahun pertama kehidupan mereka. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat penting bagi anak-anak dalam menciptakan minat belajar, membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial, mendorong pengembangan motorik halus dan keterampilan sensorik, mendorong perkembangan bahasa dan kosa kata, membuat anak-anak menjadi inovatif dan kreatif, dan memperlengkapi mereka untuk mengatasi pemecahan masalah.

Sebuah studi yang dilakukan Bank Dunia menunjukkan bahwa intervensi yang berfokus pada perkembangan anak usia dini berpotensi memberikan negara investasi terbaik dengan meningkatkan hasil individu, komunitas, dan masyarakat. Intervensi PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) memberikan fondasi paling dasar bagi seseorang anak tumbuh dewasa (OECD / *Asian Development Bank*, 2015; Denboba dkk, 2014; Denboba dkk, 2015). Sebuah studi penelitian menunjukkan adanya dampak signifikan dari intervensi PAUD holistik terhadap perkembangan kesejahteraan fisik dan intelektual anak-anak (Shonkoff, 2012). Studi tersebut juga menunjukkan bahwa siswa dengan paparan PAUD holistik menjadi anggota masyarakat yang lebih produktif di tahap akhir kehidupan, sehingga menciptakan bangsa yang lebih kuat. Dengan demikian, pengembangan anak-anak pra sekolah, beserta orangtua, dalam semua aspek perkembangannya termasuk sosial, kognitif, dan fisiologis, merupakan sebuah investasi paling efektif. Sebuah investasi yang membangun modal manusia, mengurangi ketidaksetaraan, dan mendorong pertumbuhan dan kemakmuran di masa depan.

Terlepas dari pentingnya PAUD terhadap proses perkembangan anak-anak, tingkat pendaftaran peserta didik dalam program pra-sekolah di Indonesia masih relatif lebih rendah daripada di negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebanyak 23.737 desa (34,84%) tidak memiliki layanan pendidikan anak usia dini (kisaran usia anak 3 hingga 6 tahun). Selain itu, pada kenyataannya, layanan pendidikan anak usia dini saat ini masih di bawah standar minimal. Kualifikasi guru, misalnya, masih jauh di bawah standar. Menurut standar kualifikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, guru PAUD setidaknya harus memiliki gelar sarjana. Namun, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini mencatat dari 600 ribu guru yang ada, hanya 21 persen saat ini telah mencapai gelar sarjana. Sisanya, biasanya lulusan sekolah menengah pertama dan menengah atas atau yang tertinggi lulusan Diploma-2 (D-2). Berangkat dari permasalahan tersebut, WLF bekerjasama dengan konsultan peneliti berusaha mengidentifikasi masalah pendidikan anak usia dini khususnya di wilayah Sumba Barat Daya.

1.2. Tujuan Penelitian

Analisa situasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan terkait PAUD di Sumba Barat Daya. Ada dua pertanyaan umum sebagai pedoman untuk studi analisis ini, yaitu:

1. Bagaimana situasi saat ini dan masalah umum terkait layanan pendidikan anak usia dini di Sumba Barat Daya?
2. Apa prioritas masalah yang harus diselesaikan melalui intervensi WLF pada layanan pendidikan anak usia dini di Sumba Barat Daya?

Secara khusus, penelitian ini akan menggali informasi yang berkaitan dengan:

1. Status umum data demografis, data pendidikan, data kesehatan dan nutrisi, peluang ekonomi dan informasi kebijakan.
2. Ketersediaan dan aksesibilitas ke layanan pendidikan anak usia dini
3. Kualitas layanan PAUD di Sumba Barat Daya
4. Kemampuan, keterampilan dan pengetahuan pendidikan anak usia dini
5. Lingkungan sosial dan kebijakan yang terkait dengan pendidikan anak usia dini

1.3. Demografis Wilayah

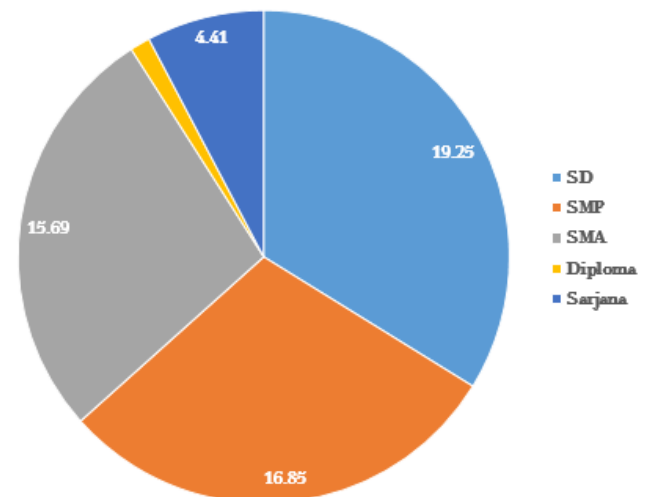
Berdasarkan data survey angkatan kerja nasional, jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama di Sumba Barat Daya yaitu bidang pertanian (96.079 jiwa), industri pengolahan (13.382 jiwa), dan perdagangan dan jasa akomodasi (6.308 jiwa). Dari total 139.453 jiwa angkatan kerja, 43% tidak menamatkan pendidikan SD. Sedangkan, angka partisipasi murni Sumba Barat Daya untuk jenjang SD sederajat tahun 2016 adalah 92,62%, untuk jenjang SMP sederajat adalah 61,14%, dan jenjang SMA Sederajat adalah 43,14%.

Dilihat dari jenis pekerjaannya, mayoritas penduduk Sumba Barat Daya bekerja sebagai petani dan peternak.

Dari sisi pertanian, luas lahan sawah di Sumba Barat Daya tahun 2016 tercatat seluas 7.692 hektar dengan produktivitas padi sawah adalah 4,07 ton/ha dan padi ladang 2,82 ton/ha. Sedangkan, komoditas perkebunan pada tahun 2016 dengan luas tanam terbesar berturut-turut adalah jambu mete, kelapa, dan kopi. Dari sisi peternakan, populasi ternak yang paling banyak di Sumba Barat Daya adalah kambing dengan jumlah sebanyak 17.422 ekor pada tahun 2016.

Perlu dicermati, tingkat kriminalitas di wilayah Sumba Barat Daya masih cukup tinggi. Pada tahun 2016 tercatat 329 tindak pidana yang terjadi, dengan persentase penyelesaian tindak pidana sebesar 68,69%. Tingkat kriminalitas yang tinggi didorong oleh tingginya tingkat kemiskinan. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), 2014 – 2017, sebanyak 99.540 jiwa penduduk di

Grafik 1: Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Sumba Barat Daya (BPS, 2018)



Sumba Barat Daya masuk dalam kategori penduduk miskin¹ atau sebanyak 30% dari total penduduk di kabupaten Sumba Barat Daya.

Table 1: Jumlah PAUD/TK/RA dan Kelompok Belajar per Kecamatan (Dapodik Kemedikbud 2018)

No	Kecamatan	TK/PAUD/RA			Kelompok Belajar			Total
		Negeri	Swasta	Total	Negeri	Swasta	Total	
1	Kodi	0	7	7	0	12	12	19
2	Kodi Bangedo	0	7	7	0	6	6	13
3	Loura	0	12	12	0	7	7	19
4	Wewewa Barat	0	14	14	0	21	21	35
5	Wewewa Selatan	0	12	12	0	19	19	31
6	Wewewa Timur	1	14	15	0	7	7	22
7	Wewewa Utara	0	9	9	0	5	5	14
8	Kodi Utara	1	9	10	0	10	10	20
9	Kota Tambolaka	0	20	20	0	9	9	29
10	Wewewa Tengah	1	7	8	1	31	32	40
11	Kodi Balaghar	0	4	4	0	4	4	8
Total		3	115	118	1	131	132	250

Tabel di atas menunjukkan jumlah PAUD/TK yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Sumba Barat Daya. Jumlah PAUD di seluruh wilayah Indonesia sendiri berjumlah 229.691. Propinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) memiliki 5.111 PAUD yang tersebar di 21 kabupaten dan kota. Sumba Barat Daya memiliki 250 PAUD, berada di urutan ke delapan jumlah PAUD terbanyak di wilayah Nusa Tenggara Timur dengan detail Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 582 PAUD, Kabupaten Kupang sebanyak 366 PAUD, Kabupaten Sikka sebanyak 356 PAUD, Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 312 PAUD, Kota Kupang sebanyak 304 PAUD, Kabupaten Ende sebanyak 293 PAUD, dan Kabupaten Manggarai sebanyak 254 PAUD.

Di Sumba Barat Daya sendiri, jumlah PAUD terbanyak di wilayah Kecamatan Wewewa Tengah dengan 40 PAUD, Wewewa Barat 35 PAUD dan Wewewa Selatan sebanyak 31 PAUD. Kecamatan dengan jumlah PAUD paling sedikit adalah kecamatan Kodi Balaghar sejumlah 8 PAUD. Apabila dianalisa berdasarkan kategori swasta dan negeri, dari total 250 PAUD, 98% PAUD di wilayah SBD berstatus swasta. Sisa 2% lainnya berstatus negeri.

¹ Definisi BPS: Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan

2. Metodologi

2.1. Metode Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini antara lain:

1. **Desk Review:** Telaah kepustakaan dilakukan untuk menganalisis data sekunder terkait sosiodemografi, kesehatan, pendidikan, layanan masyarakat, dan beberapa faktor lain yang relevan dengan PAUD di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya. Data sekunder yang digunakan meliputi, RISKESDAS (Riset Kesehatan Dasar Nasional) 2018, Sumba Barat Daya dalam angka 2018, artikel akademis yang tersedia di jurnal akademik yang berkaitan dengan topik terkait, survei lokal/ propinsi, media yang melaporkan topik terkait, data/ laporan yang tersedia dari instansi pemerintah (seperti Bappeda – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pendidikan, dan DP3A – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).
2. **FGD – Focus Group Discussion:** FGD dilakukan dengan orang tua dari anak-anak PAUD serta tenaga pendidik PAUD. FGD berlangsung kurang lebih 45-60 menit, dan direkam untuk memastikan tidak ada informasi yang terlewatkan dalam analisa data. Wawancara semi terstruktur dan FGD juga dilakukan dengan panduan wawancara.
3. **IDI – In Depth Interview:** Wawancara mendalam dilakukan dengan orang tua, pengelola PAUD, anggota masyarakat, dan kepala desa.
4. **Interview dengan Informan Kunci:** Wawancara dengan informan kunci juga dilakukan dengan melibatkan pihak terkait untuk mengeksplorasi isu-isu seputar kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan topik yang diangkat oleh orang tua, tenaga pendidik PAUD, pengelola PAUD, serta anggota masyarakat.

Topik wawancara dan FGD mengacu pada panduan semi terstruktur yang disiapkan sebelumnya. Analisa datanya sendiri dilakukan dengan mendengarkan rekaman wawancara / diskusi serta catatan penting saat wawancara. Catatan tersebut kemudian dikembangkan untuk kutipan penting. Jika data memungkinkan, triangulasi dari beberapa peserta juga dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas data yang dikumpulkan.

Table 2: Target Responden FGD

Responden	Lokasi	Nama Desa	Jumlah FGD
Orang tua murid PAUD	PAUD Ice Ndaha	Kenduwela	1
Orang tua murid PAUD	PAUD Cahaya Kasih	Radamata	1
Orang tua murid PAUD	TK Nurul Aman	Radamata	1
Orang tua murid PAUD	PAUD Embun Kasih	Kapakamadeta	1
Orang tua murid PAUD	TK Santa Theresia	Payola Umbu	1

Jumlah peserta di setiap FGD bervariasi antara 5-8 peserta. Total peserta yang mengikuti FGD berjumlah 42 orang tua. Para responden yang berasal dari instansi pemerintah adalah mereka yang berafiliasi dengan pemerintah dan dianggap bertanggungjawab terhadap layanan pendidikan anak usia dini, termasuk pihak sekolah.

Table 3: Tipe dan Jumlah Responden Wawancara Bersama Informan Kunci

Instansi	Responden	Jumlah
Bappeda	Sekretaris Bappeda	1
Bappeda	Kepala Bidang Perencanaan	1
Bappeda	Bidang Penelitian dan Pengembangan serta Bidang SDM	7
Dinas Pendidikan	Kepala Bidang PLS	1
Dinas PMD	Sekretaris Dinas PMD	1
Bupati Terpilih SBD	Dr. Kornelis K. Mete	1
LSM Donders	Manager	1
LSM Happy Hearts	Manager	1
Wahana Visi Indonesia	Manager	1
Sumba Integrity Development (partner of ChildFund International)	Manager	1
Desa Radamata	Kepala Desa	1
Desa Kenduwela	Kepala Desa	1
Desa Kapakamadeta	Kepala Desa	1
Desa Payola Umbu	Kepala Desa	1

Table 4: Target Responden IDI

Responden	Jumlah
Orang tua	4
Guru	8
Pengelola PAUD	5

Mengingat hubungan antara pendidikan anak usia dini dengan lingkungan sosial, wawancara juga dilakukan dengan orang-orang kunci seperti orang tua, guru, dan pengelola PAUD.

2.2. Teknik Sampling dan Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif, generalisasi hasil bukanlah merupakan tujuan utama. Oleh karena itu, penggunaan *purposive sampling*, yang di antaranya meliputi *convenience sampling*, lebih dianjurkan dibandingkan dengan teknik *random sampling* (Liamputtong, 2015). Dalam kajian ini, *convenience sampling* dilakukan dengan memilih responden yang mampu memberikan informasi yang utuh pada topik terkait.

Untuk memastikan validitas data, team secara manual menganalisa hasil rekaman untuk perbandingan tema yang muncul untuk memastikan validitas analisis (Mays, 1995). Tidak ada perangkat lunak analisis data kualitatif yang digunakan untuk menganalisis data. Selain itu, triangulasi antara responden yang berbeda-beda pada isu-isu tertentu dilakukan dengan membandingkan respon dari berbagai peserta/ data mengenai topik terkait. Selain itu, lokakarya rapat konsultasi temuan awal dengan para pemangku kepentingan terkait juga dilakukan. Lokakarya ini memungkinkan validasi dan klarifikasi isu yang muncul selama pengumpulan data awal. Lokakarya ini juga berperan sebagai media untuk melibatkan para pemangku kepentingan terkait

mengidentifikasi strategi yang mungkin dilakukan untuk mengatasi masalah yang ditemukan selama pengumpulan data.

Kajian ini dilakukan di Kabupaten Sumba Barat Daya terletak di Pulau Sumba, Propinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan Desember 2018 hingga Februari 2019.

3. Hasil Kajian

3.1. Indikator Kunci Pendidikan Anak Usia Dini

Ada beberapa kunci utama dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

No	Indikator	Nasional	Sumba Barat Daya	Sumber
1	% anak yang terdaftar di PAUD	68.10%	67%	Nasional: Renstra Kemendikbud 2015-2019 Sumba Barat Daya: Peraturan Bupati terkait Perubahan RPJMD tahun 2018.
2	% siswa kelas 1 SD yang pernah masuk PAUD	NA	NA	Data tidak tersedia
3	% alokasi budget yang dialokasikan untuk PAUD	NA	NA	Data tidak tersedia
4	% PAUD yang menyelenggarakan pertemuan orang tua dalam 6 bulan terakhir	NA	NA	Data tidak tersedia
4	% PAUD yang memiliki APE (Alat Peraga Edukatif) yang ramah anak	NA	NA	Data tidak tersedia
5	% PAUD yang menyediakan makanan tambahan	NA	NA	Data tidak tersedia
6	% tenaga pendidik PAUD yang mendapatkan pelatihan	NA	NA	Data tidak tersedia
7	% PAUD dengan pelayanan <i>Holistic Integrative</i> (HI)	NA	NA	Data tidak tersedia
8	% PAUD yang memenuhi standar minimum PAUD	NA	NA	Data tidak tersedia

Berdasarkan studi dokumentasi dan wawancara yang dilakukan ke dinas terkait, beberapa informasi kunci sulit didapatkan dari dinas terkait. Begitu pula saat menelusuri sumber-sumber dokumen resmi pemerintah karena tidak menyajikan secara lengkap data yang dimaksud di atas.

Dari wawancara dengan staff pemerintahan, tenaga pendidik, pengelola PAUD, serta kepala desa disampaikan bahwa:

“Tidak ada data yang lengkap terkait PAUD yang diambil setiap tahunnya. Jadi yang bisa diupdate mungkin hanya jumlah murid, besaran anggaran PAUD dan data guru. Tetapi terkait kualitas pembelajaran atau monitoring proses di PAUD, tidak ada data yang cukup lengkap. Mungkin bisa rujuk ke sumber lainnya”.

Staff Dinas Pendidikan.

Data-data yang relevan terkait PAUD memang tidak tersedia secara lengkap. Data yang mudah didapatkan hanya data jumlah guru atau status pendidikan guru PAUD. Lebih jauh dari itu, pihak

pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan, belum bisa memastikan keaktifan PAUD-PAUD yang terdaftar tersebut.

“PAUD yang telah terdaftar, artinya telah memenuhi 70 item standar nasional. PAUD wajib memenuhi 70 item tersebut sehingga bisa disebut telah terakreditasi. Namun hingga saat ini, kami belum bisa memastikan apakah ke-250 PAUD yang terdaftar di Dapodik tersebut aktif atau tidak”.

Staff Dinas Pendidikan

Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa belum semua anak usia PAUD di wilayah Sumba Barat Daya terdaftar di PAUD. Selama periode 2010-2014, pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat berhasil meningkatkan partisipasi PAUD (usia 3-6 tahun) menjadi 68,10% pada tahun 2014. Angka capaian ini naik sebanyak 17,89% dari capaian pada tahun 2010 yaitu sebesar 50,21%. Capaian tersebut nampaknya didukung oleh “Program Paudisasi” yang merupakan gerakan pemerintah untuk mewujudkan perluasan akses PAUD dengan sasaran **satu desa memiliki minimal satu satuan pendidikan PAUD**. Untuk mendukung program ini, Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) mengalokasikan bantuan untuk 25.774 rintisan PAUD baru dengan alokasi bantuan rata-rata sebesar 45.000.000 Rupiah untuk setiap satuan pendidikan PAUD. Program ini juga didukung melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, perusahaan swasta, BUMN, dan organisasi mitra untuk mengembangkan PAUD. Program Paudisasi (satu desa memiliki satu PAUD) juga dilakukan di SBD namun **belum sepenuhnya berhasil**. Menurut salah seorang kepala desa yang ditemui, memang sangat membantu sekali bahwa satu desa memiliki satu PAUD, namun apabila tidak didukung oleh tenaga pendidik yang berkualitas, dukungan orang tua dan pemerintah maka keberadaan PAUD tersebut di desa tidak menyelesaikan masalah. Bahkan bukan hanya satu PAUD di desa, di beberapa desa, bahkan ada lebih dari satu PAUD yang dibangun.

“Untuk wilayah SBD, satu desa bahkan memiliki lebih dari satu PAUD. Hal ini bagus namun apabila tidak diperhatikan kualitas tenaga pendidik, jumlah murid, tenaga pendidik yang terlatih serta dukungan pemerintah, maka keberadaan PAUD tersebut menjadi tidak maksimal. Tidak heran banyak PAUD yang tinggal papan nama saja”.

Kepala Desa

Ketiadaan data yang komprehensif terkait PAUD di Sumba Barat Daya disadari oleh hampir seluruh dinas terkait. Kesulitan juga dialami oleh dinas-dinas tersebut dalam hal perencanaan program karena tidak didukung data yang lengkap.

“Kami menyadari data yang kurang lengkap sangat menyulitkan kami dalam penyusunan program. Data-data tersebut tidak hanya tentang PAUD saja namun merata dengan data-data lainnya. Akan kami sampaikan ke pimpinan agar bisa segera ditindaklanjuti”.

Staff Bappeda

3.2. Akses dan Ketersediaan Layanan PAUD

Selama diskusi dengan pemangku kepentingan yang berbeda-beda, ditemukan bahwa jumlah PAUD tidak merata di masing-masing wilayah. Hal ini dipengaruhi dengan tidak meratanya konsentrasi penduduk di wilayah tersebut. PAUD yang dibangun tidak mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Sebagaimana diketahui bersama bahwa wilayah Sumba Barat Daya yang luas dengan konsentrasi penduduk yang tersebar menyebabkan akses ke PAUD tidak semudah anak-anak lain yang tinggal di wilayah yang dekat dengan PAUD tersebut. Hal ini dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab rendahnya jumlah anak-anak didaftarkan di PAUD.

Anak-anak yang berada di sekitar wilayah PAUD, baik di desa Kapakamadeta, Radamata, Kenduwela dan Payola Umbu umumnya bersekolah di PAUD yang dekat rumah mereka, dengan alasan jarak. Orang tua sendiri sangat mendukung anak-anak bersekolah di PAUD. Bagi orang tua, pendidikan yang diajarkan di PAUD sangat membantu perkembangan anak-anak mereka.

“Anak-anak disekolahkan di PAUD agar mereka dapat mengenai huruf lebih dini. Mereka bisa mempersiapkan diri mereka sebelum masuk ke Sekolah Dasar”.

Orang tua anak PAUD

Dalam wawancara dan FGD yang dilakukan terhadap orang tua di 5 PAUD yang dikunjungi, sebagian besar orang tua menaruh perhatian penuh dalam mempersiapkan anak-anak memasuki jenjang pendidikan formal selanjutnya. Bagi mereka PAUD merupakan tempat terbaik untuk tujuan tersebut. Masalah lain yang muncul yaitu anak-anak pada waktu-waktu tertentu tidak secara teratur ke PAUD. Alasan terbanyak yang disampaikan yaitu apabila hari hujan, mengikuti orang tua apabila harus bepergian ke tempat lain (kerja kebun), pada hari pasar, serta apabila ada upacara pesta atau kematian.

“Anak-anak di wilayah sini, ketika sudah cukup usianya pasti langsung didaftarkan ke PAUD. Biasanya perangkat desa yang membantu sosialisasi kepada orang tua untuk mendaftarkan anak ke PAUD”

Tenaga pendidik PAUD

Namun bagi desa yang tidak memiliki PAUD, atau PAUDnya tidak aktif, anak-anak usia PAUD tidak didaftarkan ke PAUD.

“PAUD di wilayah desa ini ada. Namun sayang sekali sekarang sudah tidak aktif lagi. Saya kurang tahu anak-anak yang terdaftar disitu masih bersekolah atau tidak”

Pengurus desa

Layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan terfokus pada pengajaran di kelas. Mayoritas PAUD beroperasi dari hari Senin hingga Jumat. Namun ada juga PAUD yang hanya beroperasi tiga

hari yaitu hari Senin hingga Rabu. Jam dimulainya kegiatan pun bervariasi yaitu antara pukul 08.00-10.00 WITA dan ada PAUD yang jam belajarnya dimulai sore hari pada pukul 15.00-17.00 WITA.

“Saat hari posyandu, anak-anak kami antar ke PAUD. Pelayanan posyandu dilakukan di tempat terpisah. Tidak dilakukan di PAUD. Jadi anak-anak kami antar ke sana”

Pengelola PAUD di Desa Radamata

Untuk PAUD yang dikunjungi, anak-anak diantar ke posyandu oleh orang tua mereka maupun oleh guru PAUD. Jadwal posyandu bervariasi dimasing-masing desa. Pelayanan yang diberikan di posyandu berupa pemeriksaan rutin seperti penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, dan pelayanan kesehatan lainnya apabila ada staff dari puskesmas yang datang ke posyandu. Jarang sekali pelayanan pemberian makanan tambahan bagi anak-anak di posyandu. Untuk pemberian makanan tambahan, beberapa PAUD Bersama orang tua berinisiatif menyediakan makanan tambahan bagi anak-anak berupa bubur kacang hijau. Namun pemberian makanan tambahan dilakukan secara mandiri dan tidak di semua PAUD.

No	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah PAUD / TK	Jumlah Peserta Didik			Jumlah Posyandu
				Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	Kodi	19	19	343	392	735	63
2	Kodi Bagedo	15	13	215	234	449	44
3	Loura	11	19	356	381	737	41
4	Wewewa Barat	20	35	797	824	1621	50
5	Wewewa Selatan	14	31	464	488	952	52
6	Wewewa Timur	19	22	414	435	849	47
7	Wewewa Utara	12	14	190	227	417	35
8	Kodi Utara	21	20	365	282	647	52
9	Kota Tambolaka	10	29	551	604	1155	37
10	Wewewa Tengah	20	40	706	703	1409	35
11	Kodi Balaghar	14	8	148	158	306	28
Total		173	250	4549	4728	9277	484

Orang tua secara bervariasi menjawab bahwa mereka pernah mengikuti kegiatan penyuluhan praktik pengasuhan yang dilakukan oleh kader BKB (Bina Keluarga Balita) di wilayah tempat tinggal mereka. Mayoritas menyampaikan bahwa mereka tidak mengikuti kegiatan tersebut. Hal tersebut disebabkan karena kegiatan penyuluhan praktik pengasuhan tidak rutin dilaksanakan.

“Bisa dikatakan tidak ada kegiatan penyuluhan praktik pola asuh positif kepada orang tua. Pernah ada namun tidak rutin dan tidak aktif lagi saat ini”.

Orang tua

Sebagian besar orang tua mengakui bahwa mereka tidak mengetahui bahwa ada dukungan yang diberikan kepada mereka melalui sesi *parenting* tersebut. Mereka tidak mengetahui bahwa melalui

sesi tersebut mereka akan diajarkan terkait praktik pengasuhan positif dalam membesarkan anak-anak mereka. Para orang tua mengakui bahwa secara natural, pengasuhan anak dilakukan oleh para ibu di rumah. Peran ayah sangat kecil dalam praktik pola asuh anak di rumah. Secara nasional, pelaksanaan BKB diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional nomor 12 tahun 2018 tentang Pengelolaan Bina Keluarga Balita Holistik-Integratif (BKB-HI). Disebutkan bahwa BKB merupakan layanan penyuluhan bagi orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam membina dan mengasuh tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional serta secara sosial untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kegiatan BKB dilaksanakan di masing-masing kelompok BKB minimal satu kali setiap bulannya. Terdapat 13 sesi yang wajib disampaikan saat pelaksanaan aktivitas BKB tersebut. Kegiatan BKB difasilitasi oleh pelaksana BKB, yang memberikan penyuluhan materi-materi terkait pola asuh anak. Pelaksana BKB atau kader BKB terdiri dari 3 orang yang menjalankan peran dan tugas berbeda-beda sebagai kader inti, kader piket, serta kader bantu.

Peningkatan pengetahuan orang tua terkait praktik pengasuhan diharapkan akan berpengaruh terhadap pola hidup dan pola pengasuhan yang dilakukan di rumah terkait tumbuh kembang anak.

3.3. Kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini

Secara nasional pemerintah Indonesia telah menetapkan standar nasional penyelenggaraan layanan pendidikan anak yang berkualitas.² Standar ini berlaku dan wajib diterapkan di seluruh tingkatan pendidikan anak usia dini sesuai masing-masing kategori usianya. Standar ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui **Permendikbud no. 137 tahun 2014**³.

Secara garis besar, syarat sebuah penyelenggaraan pendidikan anak usia dini adalah kualitas penyelenggaraannya yang melingkupi berbagai macam aspek. Kualitas tersebut mencakup proses pembelajaran di PAUD, kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana, pembiayaan serta tata kelolanya.

Menurut para orang tua, sangat penting memberikan pendidikan yang berkualitas bagi anak. Harapannya yakni dengan Pendidikan yang berkualitas akan membentuk anak-anak yang berkepribadian positif dengan perkembangan yang baik.

“Kami mendukung anak-anak kami untuk mendapatkan pendidikan yang baik demi kelangsungan hidup mereka kedepan”.

Orang tua di Desa Radamata, Kapakamadeta dan Kenduwela

Namun berdasarkan pengamatan yang dilakukan di beberapa PAUD yang dikunjungi dan berdasarkan diskusi dengan responden kunci tidak ada PAUD yang memenuhi persyaratan sesuai

² Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

³ Standar PAUD terdiri atas: (1) Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian; (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (6) Standar Sarana dan Prasarana; (7) Standar Pengelolaan; dan (8) Standar Pembiayaan

standar yang ditetapkan oleh pemerintah, mulai dari standar pembelajaran, standar kompetensi dan kualitas guru, kualitas sarana dan prasarana hingga pengelolaan dan pembiayaan. Namun, muncul kekhawatiran dari para orang tua mengenai kualitas layanan dan pendidikan di PAUD. Masalah/tantangan utama yang diangkat dalam diskusi antara lain:

1. Kurangnya ruang kelas yang terpisah antara siswa usia 3-4 dan usia 5-6 tahun atau yang dikenal dengan istilah murid kelas kecil (3-4 tahun) dan kelas besar (5-6 tahun). Pengajaran PAUD dilakukan di kelas yang bersamaan, dengan metode yang dapat dikatakan tidak ada pemisahan untuk kedua kategori usia tersebut. Yang membedakan hanyalah bagaimana pendekatan (penggunaan Bahasa) ke anak-anak sesuai kategori usianya tersebut.
2. Tidak ada dukungan pengawas dan monitoring rutin dari pemerintah daerah. Sebagian besar PAUD yang dikunjungi menyampaikan bahwa mereka jarang mendapatkan supervisi dari pegawai tingkat Kabupaten.
3. Sebagian besar PAUD tidak memiliki bangunan yang layak dan ramah anak.
4. Tidak tersedianya APE (Alat Permainan Edukatif) dalam dan luar yang memadai untuk PAUD. Beberapa PAUD memiliki APE tersebut, namun APE tersebut kebanyakan sudah rusak atau tidak layak pakai serta kurang aman bagi anak. Tempat bermain anak yang tidak aman juga menjadi isu yang dibahas. Lingkungan bermain yang tidak bersih, banyak bebatuan yang berserakan di tempat bermain, rumput tinggi yang tidak dipangkas, tempat bermain anak yang juga menjadi tempat hewan diikat, serta tidak berpagar untuk beberapa PAUD yang berada di pinggir jalan besar.
5. Sebagian besar PAUD tidak memiliki toilet yang bersih dan layak. Kategori bersih dan layak diartikan tidak berbau, memiliki air yang cukup dan ukuran tinggi tangga atau kloset mempertimbangkan apakah mudah dijangkau murid PAUD atau tidak.
6. Sebagian besar PAUD tidak menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir yang dilengkapi sabun. Hanya beberapa PAUD yang menyediakan tempat cuci tangan tersebut.
7. Mayoritas tingkat Pendidikan tenaga pendidik di PAUD adalah SMA (Sekolah Menengah Atas). Sebagian kecil merupakan sarjana baik kategori sarjanaan umum maupun sarjana Pendidikan PAUD

3.4. Kesenjangan Kapasitas PAUD

Ada kesenjangan kapasitas yang cukup besar di antara beberapa pemangku kepentingan PAUD yang berbeda yaitu antara para tenaga pendidik PAUD, Komite PAUD, Pengelola PAUD, Orangtua serta Masyarakat sekitar terkait peningkatan akses dan kualitas layanan di PAUD.

Kesenjangan tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

1. **Tenaga Pendidik (Tendik) PAUD:** Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, mayoritas tenaga pendidik menyampaikan bahwa mereka jarang mendapatkan atau hampir dapat dikatakan tidak sama sekali menerima pelatihan tentang metode pengajaran PAUD, manajemen kelas, penggunaan bahan ajar, pelatihan disiplin positif, pelatihan praktik pengasuhan, dan pendalaman kurikulum PAUD (kurikulum 2013-PAUD) dari Pemerintah Daerah. Kalaupun mendapatkan pembekalan, itu berupa ceramah yang diberikan di tingkat Kabupaten. Beberapa PAUD yang

dikunjungi menyampaikan bahwa mereka terlibat dalam pelatihan/ceramah 1000 hari kehidupan dari Direktorat Jendral PAUD. Namun pelatihan terkait PAUD, pembekalan kurikulum PAUD, pengelolaan PAUD, serta manajemen kelas sama sekali belum pernah diberikan. Kekurangan dana pemerintah Kabupaten menjadi salah satu penyebab tidak dianggarkannya pelatihan bagi tenaga pendidik PAUD. Untuk PAUD lainnya yang didampingi oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau yayasan lain, para tenaga pendidik PAUD dibekali dengan pelatihan. LSM Donders yang mendampingi PAUD di 8 kecamatan di wilayah Sumba Barat Daya melakukan pelatihan rutin untuk peningkatan kapasitas tenaga pendidik PAUD.

"Pelatihan terakhir yang kami berikan yaitu pelatihan kepada 45 tutor dari PAUD dampingan Donders. Pelatihan berupa refresh tersebut kami lakukan pada bulan Februari 2019 terkait pengajaran di PAUD"

Manager LSM Donders

Keberadaan beberapa LSM di wilayah Sumba Barat Daya sangat membantu dalam peningkatan kapasitas dan kualitas PAUD dampingan. Namun pendampingan tersebut hanya diberikan terbatas pada PAUD dampingan saja. Model pendampingan PAUD yang dilakukan oleh LSM yang berada di wilayah kerja SBD memberikan kontribusi positif bagi PAUD dampingan tersebut. LSM Happy Hearts, LSM Donders, Yayasan SID (*Sumba Integrity Development*) serta Wahana Visi Indonesia melakukan pendampingan bagi beberapa PAUD dengan fokus peningkatan kapasitas tenaga pendidik melalui pelatihan, diklat, serta pendampingan khusus. Selain itu, intervensi pembangunan fisik sebagaimana yang dikerjakan oleh Happy Hearts dengan tujuan memberikan akses kepada anak-anak untuk pendidikan yang berkualitas.

2. **Komite PAUD/ Kelompok Orang Tua:** Sebagaimana yang diatur dalam **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 75 tahun 2016** tentang komite sekolah, setiap sekolah mulai dari level pendidikan usia dini hingga pendidikan atas wajib memiliki komite sekolah. Peran dan tanggungjawab orang tua yang dinaungi komite tersebut sangat besar dalam memastikan pendidikan anak berjalan. Di wilayah Sumba Barat Daya, komite PAUD atau kelompok orang tua tergolong pasif atau sebagian besar tidak aktif. Para orang tua jarang dilibatkan dalam membuat perencanaan tahunan PAUD, termasuk sejauh mana peran orang tua dan masyarakat sekitar bertanggungjawab untuk kelangsungan PAUD tersebut. Tidak adanya pertemuan rutin yang dijadwalkan dan disepakati bersama orang tua. Namun orang tua menyampaikan bahwa mereka memiliki komitmen tinggi untuk membantu penyelenggaraan pembelajaran di PAUD. Komitmen orang tua ditunjukkan melalui dukungan riil yang para orang tua lakukan bagi PAUD tersebut. Para orang tua di TK Nurul Aman yang dikunjungi menyampaikan bahwa mereka menyumbang meja dan kursi sebanyak 14 pasang untuk mendukung pembelajaran anak-anak di TK tersebut. Orang tua lainnya di Desa Radamata menyampaikan bahwa bersama pihak desa mereka memberikan bidang tanah untuk dibangun PAUD. Sebagian besar orang tua yang dikunjungi menyatakan secara tegas dukungan mereka bagi Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas di wilayah mereka masing-masing karena mereka menyadari pentingnya PAUD bagi perkembangan anak-anak mereka, termasuk apabila ada dukungan dari institusi lain misalnya LSM, paguyuban,

dan pemerhati pendidikan, sangat mereka dukung karena bagi mereka dukungan LSM dikerjakan secara nyata dan bertanggungjawab.

3. **Manajemen PAUD (Pengelola PAUD):** Sebagian besar PAUD di SBD merupakan PAUD swasta (98%). Dalam kunjungan ke beberapa PAUD, disebutkan bahwa perhatian pengelola yang sangat besar menyebabkan dengan keadaan terbatas mereka memberanikan diri mendirikan PAUD. Dukungan dan dorongan dari para orang tua di sekitar wilayah tempat tinggal mereka, menguatkan mereka untuk mendirikan PAUD. Namun yang menjadi kendala yaitu keterbatasan dana dan sarana penunjang proses pembelajaran di PAUD. Dana BOP (Bantuan Operasional PAUD Pendidikan Anak Usia Dini) yang diberikan tidak mencukupi operasional, sebagaimana disampaikan bahwa selain jumlahnya kurang juga seringkali tidak tepat waktu proses pencairan dananya. Untuk tahun anggaran 2019, sebagaimana tertuang dalam **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 Tahun 2019** tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019 menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP diperuntukkan bagi seluruh murid PAUD yang terdaftar di Dapodik. Besaran dana yakni 600.000 Rupiah per peserta didik per tahun. Pencairan dana dilakukan dalam dua termin dengan persentase 50% per termin. Biasanya pembayaran dilakukan pada bulan Maret dan Agustus dalam bulan berjalan. PAUD yang terakreditasi merupakan PAUD yang sudah terdaftar di Dapodik. Memenuhi 70 item akreditasi sebagaimana tertuang dalam **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 tahun 2014** tentang Standar PAUD.

“Para pengelola PAUD selalu kami undang untuk sosialisasi penerimaan dana BOP. Harusnya memang per anak menerima 600.000 Rupiah, namun jumlah transfer dari pusat yang tidak sesuai. Sehingga pembagian ke PAUD juga tidak merata. Itu adalah DAK, jadi seluruh kewenangannya ada di pemerintah Pusat. Jumlah tersebut disesuaikan dengan proposal atau pendaftaran yang diupload di Dapodik. Apabila terlambat, yah tidak akan masuk dalam anggaran”.

Staff Dinas Pendidikan

Para pengelola PAUD mengelola PAUD dengan pengalaman manajerial yang terbatas. Bagi mereka pengalaman mereka yang menjadi kekuatan dalam mengelola PAUD. Mereka menyampaikan bahwa tidak adanya pendampingan dari pemerintah terkait pola manajemen PAUD. Bagi sebagian dari mereka, manajemen PAUD hanyalah sebatas membuat laporan ke dinas, membuat proposal pengajuan dana dan beberapa kerja administrasi lainnya di kantor.

3.5. Kebijakan terkait PAUD

Pemerintah Sumba Barat Daya periode 2019-2024 mencanangkan “Program Desa Pintar dan Desa Sehat”. Inti dari program ini adalah peningkatan kualitas dan akses masyarakat terkait Kesehatan dan Pendidikan termasuk PAUD, serta memaksimalkan peran desa dan dana desa untuk mewujudkannya. Inisiasi program tersebut menjadi prioritas pembangunan pemerintah Sumba Barat Daya periode 2019-2024.

“Semua masalah yang selalu menjadi masalah klasik dalam bidang Pendidikan dan kesehatan di SBD, akan kami atasi dengan program desa sehat dan desa pintar. Peran LSM seperti WLF sangat kami butuhkan saat penyusunan program tersebut. Akan dicanangkan 6 bulan hingga 1 tahun pertama setelah pelantikan”.

Kornelis Kodi Mete (Bupati Sumba Barat Daya 2019-2024)

Hingga tahun 2019, dalam diskusi dengan stakeholder inti, disebutkan bahwa belum ada Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang diterbitkan di Sumba Barat Daya yang mengatur terkait pendidikan termasuk Pendidikan Anak Usia Dini. Adanya peraturan daerah yang mengatur pendidikan menjadi perhatian semua pemangku kepentingan Pendidikan di wilayah Sumba Barat Daya. Tanpa ada Peraturan Daerah maka ada celah dalam garis kebijakan pendidikan dari tingkat nasional hingga kabupaten atau kota.

Secara nasional, pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Pendidikan telah membuat peraturan tentang PAUD mulai dari strategi pembelajaran PAUD hingga standar minimum untuk PAUD. Dukungan lainnya terkait PAUD secara nasional dinyatakan dalam Bantuan Operasional Pendidikan (Dana BOP), pembentukan komite sekolah, dan penyusunan kurikulum PAUD 2013 (K13). Namun **masalah yang paling menonjol** mengenai kesenjangan kebijakan adalah pembentukan/pengaktifan kembali komite manajemen PAUD. Sebagian besar PAUD tidak memiliki komite manajemen atau tidak aktif. Juga ditemukan bahwa mandat kebijakan seperti implementasi pedoman tersebut tidak diikuti saat pembentukan komite. Masalah kedua adalah **implementasi dana BOP yang belum tepat sasaran** terkait penggunaannya serta periode pelaporan pertanggungjawaban yang tidak konsisten. Ketidakkonsistenan pelaporan pertanggungjawaban BOP tersebut diyakini menjadi salah satu penyebab utama lambatnya pencairan dana tersebut untuk termin pembayaran berikutnya. Minimnya dukungan dana pemerintah daerah termasuk dukungan dana desa untuk penyelenggaraan PAUD yang berkualitas. Masalah ketiga adalah **mayoritas PAUD belum memenuhi standard minimum** sebagaimana yang dimandatkan dalam Permendikbud No. 137 Tahun 2014. Masalah keempat adalah implementasi K13 (Kurikulum 2013) PAUD telah diselenggarakan dimayoritas PAUD, namun **rendahnya pendampingan dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik PAUD** terkait kurikulum tersebut menyebabkan implementasi kurikulum K13 menjadi tidak efektif penerapannya. K13 merupakan satu-satunya kurikulum nasional yang wajib diterapkan di PAUD. (lihat [lampiran “Rujukan Peraturan Pemerintah tentang PAUD”](#) untuk daftar lengkap peraturan pemerintah).

4. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang diambil terkait permasalahan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Sumba Barat Daya sebagai berikut:

- 1) 67% persen anak usia PAUD bersekolah di PAUD. Angka ini kurang 1% dari persentase nasional yang berada pada angka 68%.
- 2) Mayoritas PAUD belum menerapkan standard minimum sesuai dengan Standar Nasional PAUD yang ditetapkan. Standar tersebut meliputi Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak; Standar Isi; Standar Proses; Standar Penilaian; Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Standar Sarana dan Prasarana; Standar Pengelolaan; dan Standar Pembiayaan.
- 3) Tidak adanya pengawas TK/PAUD yang aktif serta belum dilaksanakannya peran monitoring dan evaluasi yang komprehensif untuk mengawasi dalam memberikan dukungan teknis kepada tenaga pendidik PAUD.
- 4) Terbatasnya atau tidak tersedianya bahan ajar maupun bahan pembelajaran (misalnya APE Alat Permainan Edukasi dalam dan APE luar) yang berkualitas dan ramah anak.
- 5) Mayoritas tenaga pendidik PAUD berijazah SMA. Hal ini berbanding terbalik dengan peraturan menteri yang mewajibkan agar tendik PAUD sekurang-kurangnya merupakan sarjana di bidang PAUD.
- 6) Tenaga pendidik PAUD yang tidak terlatih dengan minim dukungan dari pemerintah daerah melalui peran pengawas PAUD. Telah dibentuk fasilitator kecamatan, namun belum efektif melakukan pendampingan ke PAUD.
- 7) Tidak adanya komite PAUD yang professional yang mendukung Pendidikan anak secara sistematis sebagaimana yang diatur dalam peraturan menteri terkait komite sekolah.
- 8) Rendahnya keterlibatan para bapak dalam kegiatan PAUD. Mayoritas orang tua yang terlibat adalah para ibu. Hal ini mungkin disebabkan masih kuatnya stigma bahwa Pendidikan anak-anak dirumah merupakan tanggungjawab para ibu.
- 9) Mayoritas orang tua yang dikunjungi merupakan petani dan pekerja di sektor non-formal lainnya dengan penghasilan yang tidak menentu setiap bulannya.
- 10) Sebagian besar PAUD belum memiliki gedung yang berkualitas dan permanen. Ada PAUD yang masih dijalankan di rumah-rumah warga.
- 11) Lingkungan PAUD yang tidak berkualitas dan aman bagi anak. Tempat bermain anak yang tidak aman, tidak adanya pagar di sekolah menyebabkan anak-anak menjadi rentan.
- 12) Mayoritas PAUD tidak memiliki toilet dengan air. Kalaupun ada, toilet yang digunakan merupakan milik masyarakat sekitar atau digunakan bersama-sama masyarakat sekitar.
- 13) Kegiatan BKB (Bina Keluarga Balita) tidak dijalankan secara konsisten bagi para orang tua.
- 14) Kegiatan posyandu selalu dijalankan dan anak-anak mendapatkan layanan dasar semisal pengukuran tinggi badan, berat badan dan pemberian vitamin.
- 15) Dukungan orang tua sangat tinggi terkait penyelenggaraan pendidikan anak. Para orang tua memahami pentingnya pendidikan dan manfaat PAUD bagi anak-anak mereka.
- 16) Minimnya dukungan dana pemerintah daerah terkait peningkatan kualitas tenaga pendidik PAUD berupa pelatihan, seminar atau workshop peningkatan kapasitas.

17) Belum adanya peraturan yang mengatur PAUD di tingkat Kabupaten

Daftar Pustaka

1. Badan Pusat Statistik Sumba Barat Daya (2018) *Sumba Barat Daya dalam Angka*. Tambolaka: BPS
2. Denboba, Amina D., Sayre, Rebecca K., Wodon, Quentin T., Elder, Leslie K., Rawlings, Laura B., Lombardi, Joan., (2014) *Early Childhood Development: Investing Young Children for High Results*. World Bank Group
3. Denboba, Amina D., Hasan, Amer., dan Wodon, Quentin., (2015) *Early Childhood Education and Development in Indonesia: An Assessment of Policies using SABER*. Washington DC: World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0646-9>
4. OECD, & ADB. (2015). *Education in Indonesia: Rising to the Challenge. Far Eastern Survey* (Vol. 20). <https://doi.org/10.1525/as.1951.20.15.01p0699q>
5. Kabupaten Sumba Barat Daya (2018) *Profil Kabupaten Sumba Barat Daya*, Tambolaka
6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2015) *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Kemendikbud. Tersedia di: http://repositori.kemdikbud.go.id/28/1/RENSTRA%20Kemendikbud%202015_2019.pdf
7. Liamputtong P, Ezzy D (2015) *Qualitative Research Methods. 2nd ed*. Oxford: Oxford University Press
8. Mays N, Pope C. (1995) Rigour and Qualitative Research. *BMJ: British Medical Journal*. 311 (6997): 109-12.
9. Shonkoff, J., L. Richter, J. van der Gaag, and Z. Bhutta, Z. (2012) An integrated scientific framework for child survival and early childhood development. *Pediatrics* 129: 460-72.

Lampiran

Daftar Lembaga Swadaya Masyarakat – Sumba Barat Daya

No	Organisasi	Tipe	Wilayah Kerja	Tahun Intervensi	Jenis Intervensi
1	Donders	Lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kodi Utara (Billa Cenge, Kenduwela, Kalena Rongo, Kori, Kendau Tana, dan Moro Manduyo). 2. Kodi (Ate Dalo, Tanjung Karoso, Mali Iha, dan Pero Batang) 3. Kota Tambolaka dan Loura (Wee Londa, Watu Kawula, dan Totok) 4. Wewewa Barat (Kabali Dana dan Pero) 5. Wewewa Tengah (Wee Rame, dan Omba Rade) 6. Wewewa Timur (Wee Limbo, Mata Piao, Mawo Dana, Tematana, dan Dikira) 	2009 sekarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. PAUD: <i>Early Literacy and Math (ELM)</i> 2. Aktivitas Pengembangan Kapasitas: Training tenaga pendidik PAUD yang dilaksanakan pada bulan Februari 2019 kepada 45 tutor/tenaga pendidik PAUD.
2	Happy Hearts	Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Loura 2. Kecamatan Wewewa 3. Kota Tambolaka 	2017 sekarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan fisik gedung PAUD, SD dan SMP di wilayah kecamatan Loura, kecamatan Wewewa, dan Kota Tambolaka. 2. Pelatihan tenaga pendidik PAUD (diklat dasar Guru PAUD, metode belajar kreatif, serta manajemen keuangan). 3. Pelatihan terkait peningkatan kapasitas 150 tendik PAUD di seluruh kecamatan di Sumba Barat Daya
3	Sumba Integrity	Lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loura (Ramadana dan Langgalero) 	2018 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan PAUD dengan

No	Organisasi	Tipe	Wilayah Kerja	Tahun Intervensi	Jenis Intervensi
	Development (bekerjasama dengan ChildFund International)		2. Wewewa Barat (Waimangura) 3. Kodi Utara (Wailabubur, Homba Karipit dan Hohawungo) 4. Kodi (Mali Iha)		pendekatan <i>Center based/ Home based</i> . 2. Pilot model untuk PAUD ramah anak, gender, <i>Disaster Risk Reduction</i> (DRR), inklusi, <i>parenting</i> , kurikulum 2013, dan positif disiplin. 3. Pilot 14 PAUD HI (<i>Holistic Integrative</i>) dengan komposisi 6 PAUD berkonsep <i>home-based</i> dan 8 PAUD berkonsep <i>center-based</i> .
4	Wahana Visi Indonesia (WVI))	Nasional	1. Kodi Utara (Mangga Nipi dan Kenduwela) 2. Kodi (Kapakamadeta, Kori, Ate Dalo, Homba Rica, dan Pero Batang)	2017 - 2019	1. Kesehatan (anak usia 0-5 tahun): Penanganan angka gizi kurang dan gizi buruk. Melalui pendekatan pos gizi yang didukung oleh kebun gizi melalui revitalisasi posyandu. 2. Peningkatan ekonomi melalui peningkatan produksi komoditi (Jambu Mete dan Jagung)

Rujukan Peraturan Pemerintah tentang PAUD

Tingkatan	Peraturan No	Tentang	Isi
Nasional	Permendikbud No. 137/2014	Standar Nasional PAUD	Ragkaian peraturan yang memuat kriteria standar yang harus dipenuhi oleh PAUD dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia dini.

Tingkatan	Peraturan No	Tentang	Isi
			<p>Pasal 2 menyebutkan bahwa standar tersebut meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPA) merupakan acuan yang digunakan untuk menetapkan standar lainnya. STPA merujuk pada desain perkembangan anak yang tertuang dalam kurikulum PAUD. Kompetensi yang hendak dicapai meliputi kompetensi inti dan kompetensi dasar. Penjelasan lebih lanjut mengenai STPA dijelaskan pada pasal 6, pasal 7, pasal 8 Permendikbud; 2. Standar Isi: Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9, standar isi meliputi program pengembangan yang disajikan ke dalam tema dan subtema. Tema dan sub tema sebagaimana dimaksud dikembangkan dengan memuat unsur-unsur nilai agama dan moral, kemampuan berpikir, kemampuan berbahasa, kemampuan sosial-emosional, kemampuan fisik-motorik, serta apresiasi terhadap seni; 3. Standar proses memuat tentang bagaimana pembelajaran direncanakan. Perencanaan pembelajaran meliputi program semester (prosem), rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan (RPPM) serta rencana pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH). Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b dilakukan melalui bermain secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, kontekstual dan berpusat pada anak untuk berpartisipasi aktif serta memberikan keleluasaan bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis anak. 4. Standar penilaian memuat kriteria penilaian atas hasil dan proses pembelajaran anak yang dilakukan di PAUD. Teknik dan mekanisme penilaian harus didesain sesuai dengan kemampuan anak, dengan persetujuan orang tua serta harus dilaporkan. Prinsip-prinsip penilaian diatur dalam pasal 19; 5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, secara nasional, harus memiliki ijazah D-IV atau S-1 bidang PAUD dan memiliki sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi. Terkait kualifikasi guru pendamping dan guru pendamping muda bisa

Tingkatan	Peraturan No	Tentang	Isi
			<p>merujuk pada penjelasan pada pasal 26 dan pasal 27;</p> <p>6. Standar Sarana dan Prasarana dalam peraturan menyebutkan bahwa ada 4 kriteria besar terkait sarana dan prasarana serta fasilitas dan perlengkapan penunjang serta kualifikasi standarnya. Syarat pengadaan fasilitas sarana dan prasarana sebagaimana dijelaskan pada pasal 31 angka 3 meliputi aman, bersih, sehat, nyaman, disesuaikan dengan usia dan kebutuhan anak serta mampu memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di sekitar lokasi PAUD tersebut;</p> <p>7. Standar pengelolaan merupakan pelaksanaan yang mengacu pada standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana serta standar pembiayaan. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 34 ayat 3, setiap PAUD wajib memiliki kurikulum, kalender Pendidikan, struktur organisasi serta tata tertib dan kode etik;</p> <p>8. Standar Pembiayaan meliputi 2 kategori yaitu komponen biaya personal dan komponen biaya operasional.</p>
Nasional	Peraturan Kepala BKKBN No. 2/2018	BKB HI (<i>Holistic Integrative</i>)	Peraturan ini mengatur tentang aktivitas BKB (Bina Keluarga Balita) yang terintegrasi. Kelompok BKB diartikan sebagai wadah kegiatan penyuluhan bagi orang tua dan anggota keluarga lainnya mengenai pengasuhan dan membina tumbuh kembang anak. Mekanisme BKB HI dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat nasional (pusat), provinsi, serta kabupaten/kota. Pasal 7 mengatur terkait rangkaian aktivitas yang dilakukan terkait persiapan dan pelaksanaan BKB HI mulai dari tingkat pusat, provinsi serta kabupaten/kota. Satu kelompok BKB dijalankan oleh 3 kader yaitu kader inti, kader piket dan kader bantu.
Nasional	Permendikbud No. 4/2019	Juknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini 2019	Petunjuk teknis ini bertujuan untuk mengatur pemanfaatan serta pertanggungjawaban DAK Nonfisik BOP tahun 2019 yang efektif, efisien serta akuntabel dan tepat waktu.
Nasional	Permendikbud No. 75/ 2016	Komite Sekolah	Komite sekolah dijelaskan sebagai lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Sekolah sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 yaitu satuan pendidikan formal yang

Tingkatan	Peraturan No	Tentang	Isi
			<p>terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK)/Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan/ Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB), dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Anggota Komite Sekolah terdiri dari unsur orang tua/wali, tokoh masyarakat, serta pakar Pendidikan. Komite sekolah berkedudukan di sekolah setempat.</p>
Nasional	Permendikbud No. 146/2014	Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini	<p>Kurikulum 13 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di dalamnya terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar yang meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan</p>



William and Lily Foundation

www.wlf.or.id

Contact: support@wlf.or.id